



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI, Rabu 26 Juni 2024



RINGKASAN BERITA HARI INI



PAMERAN HEWAN: Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apringdewi saat menghadiri kegiatan pameran dan lomba hewan kesayangan serta seminar kesehatan hewan

Pembka Dukung Pameran Hewan Tumbuhkan Ekonomi Kreatif

SIDOARJO (BM) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apringdewi mendukung kegiatan pameran dan lomba hewan kesayangan serta seminar kesehatan hewan di kabupaten setempat karena bisa menumbuhkan ekonomi kreatif. "Kami juga mendorong komunitas pecinta hewan kesayangan seperti kucing, reptil, di Kabupaten Sidoarjo berperan aktif menumbuhkan ekonomi kreatif. Dengan adanya komunitas ini diharapkan dapat memunculkan kegiatan Pengorganisasian Terbuka (PTT) di Sidoarjo, katanya dalam keterangan tertulis di Sidoarjo, Senin (24/6). Dari Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidoarjo, kata dia, PTT Kabupaten Sidoarjo menurun dalam tiga tahun terakhir. Ia mengatakan PTT Sidoarjo tahun 2021 sebesar 10,87 persen atau 130.979 orang, tahun 2022 menjadi 8,80 persen atau 118.059 orang, dan tahun 2023 mencapai angka 8,05 persen atau 94.760 orang, TPT di

Plt Bupati Berencana Beli Beras Petani

SIDOARJO (BM) - Plt Kepala Desa, Kadus, sangat besar dalam penyaluran bantuan pangan beras untuk warga yang membutuhkan. Begitu pula para tenaga kesehatan Sosial Kecamatan (TSK). Plt Bupati Sidoarjo H. Subandi mengapresiasi kepada keduanya. Distribusi beras berhasil lancar dan tepat sasaran. Plt Bupati Sidoarjo H. Subandi bersama Bulog dan PT YASA melanjutkan lagi penyaluran bantuan pangan beras. Kali ini giliran empat desa di Kecamatan Tulangan. Masing-masing di Desa Grabogan, Kepanjen, Grining, dan Grogol ke-1 Tulangan. Keseluruhan Plt. Bupati Subandi dan rombongan disambut hangat oleh masyarakat. Mereka telah menerima undangan untuk menerima bantuan beras 10 kg. Karena penyaluran bantuan tersebut dihadiri langsung oleh Plt Bupati



Plt Bupati Subandi bersama Forkopimka Tulangan



PERBAIKAN: Pekerja dari PDAM Unit Waru mengganti pipa yang keropos di bawah flyover Waru kemarin.

Bongkar Pipa Air di Jalan Raya Waru, Pastikan Aliran Tak Mati

SIDOARJO - Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Delta Tirta mengganti pipa di pinggir Jalan Raya Waru. Sambungan air ke Sidoarjo ke Sidoarjo lewat Umbulan 1, tapi langsung menyerap air Umbulan 2 yang untuk Sidoarjo, terang Irfan. Dulu, sebelum air Umbulan masuk Sidoarjo, area Waru sebagian dialiri dari Umbulan 1 yang dari Surabaya. "Sekarang langsung karena Sidoarjo sudah menyerap air Umbulan sebanyak 1.200 liter per detik," ujarnya.



Pembka Sidoarjo Persiapkan MTQ Kabupaten ke-31

Sidoarjo, Bhirawa - Lomba MTQ tingkat kabupaten yang digelar Pembka Sidoarjo tahun 2024 ini telah berjalan ke 31. Lomba digelar setiap dua tahun sekali ini akan digelar Bulan Agustus mendatang. Menurut Kepala Bagian Kesra Pembka Sidoarjo, M Khudori SIKom, MIK, Selasa (25/6) kemarin, MTQ tingkat kabupaten ini sangat penting untuk kaderisasi mereka yang akan ikut MTQ di tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional. Pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten ini dimulai dari para Camat di 18 kecamatan yang harus mendaftarkan pesertanya mulai tanggal 8 hingga 17 Juli mendatang ke Bagian Kesra Pembka Sidoarjo. "Untuk persiapan MTQ tingkat kabupaten tahun 2024 ini, Bagian Kesra saat ini sudah memasang pemberitahuan kepada umum tentang kegiatan tersebut. Dari 18 kecamatan, saat ini sudah dipasang pada 10 kecamatan. Tempat lomba seperti tahun digelar di lokasi Pendopo Delta Wibawa, Masjid Agung Sidoarjo, Lingkungan Setda Sidoarjo dan Kantor Kemenag Sidoarjo. Mendekati pelaksanaan para peserta diharapkan segera mempersiapkan diri," kata Khudori. Khudori menjelaskan, sejumlah resep bisa meraih menjadi juara dalam MTQ Kabupaten diantaranya, latihan yang serius dan maksimal, pihak kecamatan jauh hari sudah mempersiapkan penjurian para peserta MTQ dan pembinaan kepada peserta MTQ tak asal - asalan atau bonok (bondonek). Sebab selama ini hanya dua kecamatan saja yang selalu menjadi juara umum. Tahun 2020 Kecamatan Waru, dan tahun 2022 Kecamatan Sidoarjo. Khudori berharap agar juara umum MTQ di Kabupaten Sidoarjo bisa merata, artinya kemampuan para peserta hampir setara. Sehingga kompetisi juga bisa berjalan seimbang dan tidak hanya pada dua kecamatan itu saja yang selalu meraih juara.

Polresta Sidoarjo Peduli Difabel

Sidoarjo, Memorandum - Rangkaian kegiatan sosial kemasyarakatan memperingati Hari Bhayangkara ke-78 tahun, salah satunya dilakukan Polresta Sidoarjo melalui Si Dokkes dengan pemeriksaan kesehatan dan bakti sosial bagi warga difabel. Kegiatan yang berlangsung di Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-31 di Kecamatan Sidoarjo menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial. Kapolresta Sidoarjo Kombespol Christian Tobing didampingi Kasidokkes Iptu Rukwandi, melakukan pengecekan bakti kesehatan bagi warga difabel. Di akhir acara bakti kesehatan, warga yang datang diberi paket bantuan berisi sembako. "Bakti kesehatan dan bakti sosial bagi difabel ini,

kami selenggarakan dalam rangkaian Hari Bhayangkara ke-78. Harapannya penyandang disabilitas dapat terkontrol kondisi kesehatannya melalui kegiatan bakti kesehatan Polri. Sehingga dapat memacu semangat mereka untuk tetap beraktivitas," ujar Kombespol Christian Tobing. Dari bakti kesehatan dan bakti sosial bagi difabel memperingati Hari Bhayangkara ke-78, diharapkan rutin dilakukan. "Dengan upaya seperti ini, selain semakin mendekatkan Polri bersama masyarakat, juga guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat," katanya. Salah satu peserta bakti kesehatan asal Luwung, Sukmawati (54), mengaku sangat terharu dengan program ini. "Begitu besar perhatian bapak-bapak Polri bagi kami. Ini menambah semangat kami untuk terus berkarya di tengah keterbatasan," ungkapnya. (im/kri/jok/epe)



DIMULAI: Petugas Pantarilih melakukan coklit ke warga Kecamatan Taman.

Proses Coklit Pilkada, Warga Diminta Siapkan KTP atau KK

TAMAN-KPU Sidoarjo mulai melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih untuk Pilkada 2024. Proses tersebut akan berlangsung selama sebulan. Dimulai pada Senin (24/6) kemarin hingga 24 Juli nanti. KPU Sidoarjo menurunkan 5.414 petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). "Sudah ada petugas pantarlih yang turun ke lapangan setelah proses pengambilan sampel, karena ini untuk mengejar target satu juta Coklit pemilih seperti yang ditarget KPU Jatim," ucap anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Pemkab Sidoarjo Persiapkan MTQ Kabupaten ke-31

Sidoarjo, Bhirawa

Lomba MTQ tingkat kabupaten yang digelar Pemkab Sidoarjo tahun 2024 ini telah berjalan ke 31. Lomba digelar setiap dua tahun sekali ini akan digelar Bulan Agustus mendatang.

Menurut Kepala Bagian Kesra Pemkab Sidoarjo, M Khudori SIKom, MIKom, Selasa(25/6) kemarin, MTQ tingkat kabupaten ini sangat penting untuk kaderisasi mereka yang akan ikut MTQ di tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional. Pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten ini dimulai dari para Camat di 18 kecamatan yang harus mendaftarkan pesertanya mulai tanggal 8 hingga 17 Juli mendatang ke Bagian Kesra Pemkab Sidoarjo.

"Untuk persiapan MTQ tingkat kabupaten tahun 2024 ini, Bagian Kesra saat ini sudah menhiasang pemberitahuan kepada umum tentang kegiatan tersebut. Dari 18 kecamatan, saat ini

sudah dipasang pada 10 kecamatan. Tempat lomba seperti tahun digelar di lokasi Pendopo Delta Wibawa, Masjid Agung Sidoarjo, Lingkungan Setda Sidoarjo dan Kantor Kemenag Sidoarjo. Mendekati pelaksanaan para peserta diharapkan segera mempersiapkan diri," kata Khudori.

Khudori menjelaskan, sejumlah resep bisa meraih menjadi juara dalam MTQ Kabupaten diantaranya, latihan yang serius dan maksimal, pihak kecamatan jauh hari sudah mempersiapkan penjurian para peserta MTQ dan pembinaan kepada peserta MTQ tak asal - asalan atau bonek (bondo nekat). Sebab selama ini hanya dua kecamatan saja yang selalu menjadi juara umum. Tahun 2020 Kecamatan Waru, dan tahun 2022 Kecamatan Sidoarjo. Khudori berharap agar juara umum MTQ di Kabupaten Sidoarjo bisa merata, artinya kemampuan para peserta hampir setara. Sehingga kompetisi juga bisa berjalan seimbang dan tidak hanya pada dua kecamatan itu saja yang selalu meraih juara.

Menurut evaluasinya, kepesertaan dari wilayah kecamatan di pinggiran yang dinilai sangat minim dalam mengirimkan peserta MTQ nya. Misalnya Kecamatan Balongbendo, Tarik dan Jabon. Maka ke depannya di kecamatan yang belum pernah meraih juara harus dimotivasi dan dibekali dengan ilmu yang cukup, sebab peserta yang dikirim dalam MTQ Kabupaten rata - rata hanya 12 orang saja. [kus.fen]



Berhasil Pertahankan Disertasi Soal Lumpur Sidoarjo

Pegiat Kebencanaan Raih Doktor

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Pegiat Kebencanaan asal Sidoarjo, Moh Shofwan berhasil meraih gelar doktor pada prodi Doktor Ilmu Administrasi bidang Kajian Pengembangan Wilayah dan Kebencanaan FISIP Untag Surabaya.

Ia berhasil mempertahankan disertasinya tentang pengembangan wilayah di kawasan bencana Lumpur Sidoarjo (studi tentang pengembangan infrastruktur dan kawasan terbangun) di hadapan para Dewan Penguji dan Profesor, Selasa (25/6).

Bencana Lumpur Sidoarjo terjadi pada 29 Mei 2006 silam hingga menenggelamkan sejumlah desa di tiga kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Hal itu akibat semburan gas dan lumpur panas dari dalam tanah dengan suhu 100 derajat celsius.

Shofwan mengatakan, akibat dari semburan Lumpur Sidoarjo itu, berdampak pada pola perencanaan dan pemanfaatan lahan di sekitar

kawasan bencana Lumpur Sidoarjo, khususnya terkait pengembangan infrastruktur dan kawasan terbangun.

"Baik itu untuk permukiman, kawasan industri, kawasan perdagangan dan jasa serta fasilitas umum dan fasilitas sosial," tutur dosen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas PGRI Adi Buana (Unipa) Surabaya ini.

Ia menjelaskan, penanganan pasca bencana khususnya terkait penataan ruang dan pengembangan wilayah harus mengedepankan fungsi Collaborative Governance. Artinya semua unsur wajib terlibat, sehingga apa yang menjadi problem dan apa yang diinginkan ke depannya dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan.

"Misalnya terkait penataan permukiman komunal pasca bencana Lumpur Sidoarjo di beberapa titik wilayah Kecamatan Porong, Tanggulangin, dan Jabon," tandas Wakil Ketua Badan Kemariti-

man Nahdlatul Ulama (BKNU) Sidoarjo ini.

Salah satu model yang dihasilkan dalam disertasi Shofwan ini, yaitu membangun model perencanaan dan pengembangan wilayah pasca bencana. Normatifnya perencanaan wilayah itu dimulai dari penyusunan rencana, penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Namun dalam kondisi pasca bencana, maka hal semacam ini perlu dirumuskan kembali. Dan Shofwan menemukan model baru yang dinamai dengan PD-EBP (Post Disaster-Evidence Based Planning).

"Yaitu memasukkan unsur penilaian program melalui identifikasi dan analisis masalah serta kebutuhan (kawasan terdampak pasca bencana), dan unsur pengembangan anggaran (kawasan terdampak pasca bencana) pada sebelum tahapan perencanaan wilayah secara normatif," pungkas anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) ini. (sta/cad/rus)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Direkom PAN, Khulaim Meroket

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Pilkada Sidoarjo kian panas dan persaingan dipastikan bakal berlangsung ketat. Ada salah satu tokoh Sidoarjo yang namanya tiba-tiba meroket. Adalah Khulaim Junaidi atau biasa disapa Cak Khulaim. Nama Cak Khulaim langsung meroket setelah ia direkom PAN untuk maju dalam Pilkada Sidoarjo.

DPP Partai Amanat Nasional (PAN) mengeluarkan surat rekomendasi untuk Pilkada di Kabupaten Sidoarjo. Khulaim Junaidi akhirnya dipilih DPP PAN untuk maju sebagai Cabup Sidoarjo 2024-2029.

Rekomendasi dengan nomor 293/Pilkada/V/2024 yang ditanda tangani Tim Pilkada DPP PAN yakni Viva Yoga Mauladi, Yandri Susanto dan P Saleh, Cak Khulaim juga diberi tugas untuk segera mencari cawabup sebagai pasangannya di Pilkada Sidoarjo 2024. Cak Khulaim pun langsung bergerak untuk melaksanakan tugas partai.

Surat rekomendasi dari DPP PAN untuk Cak Khulaim maju sebagai Cabup Sidoarjo dib-



Cak Khulaim (tengah berjaket) yang namanya langsung meroket setelah direkom PAN.

acakan oleh Forum Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Amanat Nasional (PAN) se-Sidoarjo yang diwakili Ketua DPC PAN Kecamatan Sidoarjo, Didik Prihantono.

“Saya sudah melakukan seperti amanat dari DPP PAN. Alhamdulillah hari ini saya sudah mengundang seluruh ranting se-Sidoarjo untuk mendengarkan dan menunjukkan rekomendasi dari DPP,” ujar Cak Khulaim di sela-sela Ngobrol Gayeng (Ngoyeng) Bareng Cak Khulaim di Fave Hotel Sidoarjo, Minggu (23/6).

Cak Khulaim bersama PAN juga berkomunikasi dengan parpol lain untuk bisa berkoalisi dan menyampaikan visi misi dan dan menyamakan persepsi dalam Pilkada 2024. Termasuk menjalin komunikasi dengan calon bupati yang sudah running agar bisa menjadi satu pasangan paket, baik bupati maupun wakil bupati. “Kami tidak harus menentukan bupati atau wakil bupati. Yang jelas partai akan mengambil keputusan jelang pendaftaran Agustus 2024,” jelas Cak Khulaim. **(md/rus)**

HARIAN
BANGSA
Koran Warga Jatim

Plt Bupati Berencana Beli Beras Petani

SIDOARJO (BM) - Peran kepala desa (kades) sangat besar dalam penyaluran bantuan pangan beras untuk warga yang membutuhkan. Begitu pula para Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Plt Bupati Sidoarjo H. Subandi mengapresiasi kepada keduanya. Distribusi beras berhasil, lancar dan tepat sasaran.

Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi bersama Bulog dan PT YASA melanjutkan lagi penyaluran bantuan pangan beras. Kali ini giliran empat desa di Kecamatan Tulangan. Masing-masing di Desa Grabagan, Kepunten, Grinting, dan Grogol Kec. Tulangan.

Kedatangan Plt. Bupati Subandi dan rombongan disambut hangat oleh masyarakat. Mereka telah menerima undangan untuk menerima bantuan beras 10 Kg.

Karena pembagian bantuan tersebut dihadiri langsung oleh Plt Bupati

Sidoarjo masyarakat dari keluarga penerima manfaat (KPM). Banyak yang memilih duduk di depan, ingin bertemu langsung dengan pimpinan daerah.

Berapa penerima bantuan pangan beras ini? Di Kecamatan Tulangan, terdapat 5.662 KPM. Semuanya menerima bantuan beras 10 Kg. Di Desa Grabagan ada 382 KPM, Kepunten 522 KPM, Grinting 341 KPM, dan Grogol 300 KPM. Beras ini merupakan alokasi bantuan bulan Mei 2024.

Di wilayah Sidoarjo, total KPM penerima bantuan mencapai 92.127 KPM. Tempat tinggal menyebar di 18 kecamatan. Semua telah menerima beras untuk alokasi bulan Mei 2024 ini. "Terimakasih Pak Lurah, Pak Kades, dan TKSK yang telah membantu distribusi beras ini," ucap Plt Bupati Subandi saat bertemu warga Desa Grogol, pekan lalu.

Plt. Subandi berharap bantuan beras ini dapat menekan harga beras. Juga mengendalikan angka inflasi.

Serta, meningkatkan sektor pertanian di Sidoarjo. Terutama, membantu perekonomian warga yang menerima bantuan. Kualitas beras sudah bagus. Bisa langsung dikonsumsi oleh keluarga PKM. "Beras ini jangan sampai di jual di toko," pesan Subandi.

Berkat peran para kepala desa dan lurah, tenaga desa, serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), proses distribusi di 18 kecamatan berjalan dengan baik. Mereka mendata masyarakat yang tidak mampu. Sesuai sasaran bantuan pangan.

"Peran pemerintah desa dan TKSK mendata masyarakat yang tidak mampu sudah bagus. Dengan begitu, kita bisa tahu berapa jumlah KPM yang perlu diberi bantuan," ungkap Subandi.

Plt Bupati Subandi juga punya niat dan berencana baik untuk membantu para petani Sidoarjo. Potensi pertanian Kabupaten Sidoarjo juga bagus. Subandi ingin mengolah potensi tersebut dan bekerja sama dengan Bulog serta Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo.

Beras hasil sawah dari petani Sidoarjo bisa dijadikan beras untuk bantuan pangan warga Sidoarjo juga. Jadi, dari Sidoarjo untuk Sidoarjo. Petani dapat manfaat. Penerima bantuan pun dapat manfaat juga. "Konsepnya, hasil tani dari Sidoarjo akan kita beli melalui Bulog. Kemudian, beras itu akan dijual dan didistribusikan untuk kepentingan masyarakat Sidoarjo sendiri," terang Subandi.

Bantuan pangan beras adalah program pemerintah berupa penyaluran beras yang bersumber dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog. Program ini merupakan salah satu pemanfaatan CBP sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah. (udi)



BM/IST

Plt Bupati Subandi bersama Forkopimka Tulangan



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



BM/ST

PAMERAN HEWAN: Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati saat menghadiri kegiatan pameran dan lomba hewan kesayangan serta seminar kesehatan hewan.

Pemkab Dukung Pameran Hewan Tumbuhkan Ekonomi Kreatif

SIDOARJO (BM) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati mendukung kegiatan pameran dan lomba hewan kesayangan serta seminar kesehatan hewan di kabupaten setempat karena bisa menumbuhkan ekonomi kreatif.

"Kami juga mendorong komunitas pecinta hewan kesayangan seperti kucing, reptil, di Kabupaten Sidoarjo berperan aktif menumbuhkan ekonomi kreatif. Dengan adanya komunitas ini diharapkan dapat menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sidoarjo," katanya dalam keterangan tertulis di Sidoarjo, Senin (24/6).

Dari Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidoarjo, kata dia, TPT Kabupaten Sidoarjo menurun dalam tiga tahun terakhir.

Ia mengatakan TPT Sidoarjo tahun 2021 sebesar 10,87 persen atau 130.979 orang, tahun 2022 menjadi 8,80 persen atau 118.059 orang, dan tahun 2023 mencapai angka 8,05 persen atau 94.760 orang. TPT di

Sidoarjo pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,75 poin atau 23.299 orang.

"Saya harap pameran dan lomba ini bukan hanya sekadar hobi semata, namun juga hiburan yang nantinya mendatangkan rezeki. Mulai dari pergerakan ekonomi dari mall (tempat kegiatan) hingga efek berantai ekonomi lainnya," tutur Fenny.

Menurutnya, kegiatan seperti ini akan terus dilakukan secara periodik dan diwajibkan penyelenggara menampilkan kesenian khas Kabupaten Sidoarjo seperti Tari Banjar Kemuning. "Kami sudah menyosialisasikan kepada seluruh perhotelan serta penyelenggara agar tiap kegiatan selalu melibatkan pecinta seni budaya," ucapnya.

Acara itu juga menghadirkan seminar kesehatan hewan yang diisi oleh para pakar dan praktisi di bidang veteriner (dokter hewan) sebanyak 75 orang, dengan tujuan mengedukasi pemilik hewan peliharaan mengenai pentingnya men-

jaga kesehatan dari kesejahteraan hewan kesayangan mereka.

Sementara itu Kepala Dinas Pangan dan Pertanian (DPP) Kabupaten Sidoarjo Eni Rustianingsih menyebut hewan peliharaan ini belum ada data yang kongkrit sehingga butuh peran dokter hewan yang sudah praktik agar mengirimkan data ke pemkab, karena selama ini yang terdata hanya hewan ternak seperti sapi dan kambing. "Seminar ini juga salah satunya untuk mencegah penyakit zoonosis pada hewan," ucapnya.

Salah satu anggota Indonesian Cat Association (ICA) Cabang Sidoarjo, Wendhy Hidayat berharap kegiatan seperti ini dilakukan secara besar yaitu menggandeng seluruh komunitas seluruh hewan kesayangan menjadi Pets Expo.

"Nantinya saya harap ada Pets Expo yang diselenggarakan dalam lingkup lebih besar. Selama ini bentuk dukungan pemerintah sudah sangat baik yaitu dengan pemberian subsidi vitamin bagi kesehatan hewan kesayangan," katanya. (udi)



DITE SURENDRA/JAWA POS

BENGKOK: Pembatas jembatan overpass Sidokepong, Sidoarjo, rusak dihantam kendaraan besar kemarin (25/6).

Pagar Overpass Sidokepong Rusak, Usulkan Pelebaran ke Pempus

SIDOARJO - Pagar *overpass* tol di Desa Sidokepong, Kecamatan Buduran, rusak setelah dihantam truk. Besi pagar bengkok meski tak sampai jebol.

Yudhi Ardian, salah seorang warga, menuturkan, kondisi kerusakan sudah cukup lama. "Kerobohan truk yang miring. Untung kuat, jadi tidak sampai jebol," katanya.

Harapannya bisa segera

diperbaiki. Takutnya, saat ada laka lagi, pagar sudah tidak terlalu kuat dan kendaraan tidak tertahan. "Bahaya kalau jebol bisa jatuh, apalagi besi rangkanya sudah ada yang patah," katanya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo Dwi Eko Saptono mengatakan, pemeliharaan pagar tersebut menjadi ranah

jasa marga. Laporan kerusakan bakal disampaikan agar segera diperbaiki.

Dwi mengungkapkan, pihaknya juga akan mengusulkan *overpass* tersebut agar bisa diperlebar. Sebab, saat ini kendaraan roda empat yang lewat harus bergantian.

Dwi mengatakan, *overpass* itu sempat diusulkan ke pemerintah pusat (pempus) untuk dilebarkan. "Kami usul-

kan tiga *overpass* yang diperlebar," ujarnya. Yakni, Sidokepong, Banjarpoh, dan Sepande.

Dari usulan tersebut, satu *overpass* tahun ini sempat akan direalisasikan, yakni *overpass* Sepande. Namun, hingga saat ini pihaknya belum mendapat kejelasan terkait kepastian pelebarannya. "Sepertinya tertunda karena sampai saat ini kami belum mendapatkan kejelasan terkait

pelaksanaannya," katanya.

Karena itu, pihaknya akan kembali mengusulkan. Usulannya tetap tiga *overpass* tersebut yang kondisi lalu lintasnya padat. "Memang perlu diusulkan lagi karena lalu lintas harian yang melintas cukup padat," jelasnya. Bahkan, pada jam kerja dan pulang kantor, kemacetan kerap terjadi karena kendaraan harus bergantian melintas. (uzi/c7/any)

Jawa Pos



DITE SURENDRA/JAWA POS

PERBAIKAN:
Pekerja dari PDAM Unit Waru mengganti pipa yang keropos di bawah flyover Waru kemarin.

Bongkar Pipa Air di Jalan Raya Waru, Pastikan Aliran Tak Mati

SIDOARJO – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Delta Tirta mengganti pipa di pinggir Jalan Raya Waru. Sambungan air ke warga dipastikan masih lancar.

Meskipun pembatas sudah dipasang, Humas Perumda Delta Tirta Ifan Bakhtiar mengimbau warga yang melintas bisa berhati-hati karena ada pengerjaan galian. Dia menyebutkan, pihaknya mengganti pipa berukuran 150 meter untuk menyalurkan air dari Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Umbulan. "Ada pekerjaan penggantian Umbulan

1 ke Umbulan 2," katanya.

Umbulan 1 adalah air Umbulan yang dialirkan dari Surabaya ke Sidoarjo. "Jadi, pipanya diganti, tidak lagi menyalurkan air dari Surabaya ke Sidoarjo lewat Umbulan 1, tapi langsung menyerap air Umbulan 2 yang untuk Sidoarjo," terang Ifan.

Dulu, sebelum air Umbulan masuk Sidoarjo, area Waru sebagian dialiri dari Umbulan 1 yang dari Surabaya. "Sekarang langsung karena Sidoarjo sudah menyerap air Umbulan sebanyak 1.200 liter per detik," ujarnya.

Ifan menjelaskan, selama penggalian, tidak sampai ada pemutusan sambungan ke warga. Namun, saat nantinya mulai menyambungkan pipa, aliran ke warga sementara akan dikesilkan atau bahkan mati. "Tapi tidak lama karena hanya mengubah jalur air. Pengesilkan hanya sekitar dua jam," ungkapnya.

Tidak sampai seharian penuh dan hanya di area sekitar. Pihaknya juga akan menyampaikan informasi gangguan ke masyarakat jika nanti mulai proses pengesilkan air. (uzi/c9/any)

Jawa Pos

Segera Tambah Alat

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

Perekaman KTP Keliling

SIDOARJO - Pemkab Sidoarjo berencana menambahkan alat perekaman data kependudukan *mobile* atau keliling dan mesin pencetak KTP elektronik (e-KTP) di kantor kecamatan. Layanan bisa semakin cepat dan dekat dengan masyarakat.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Sidoarjo Redy Kusuma mengatakan, berdasar rapat bersama DPRD Sidoarjo, diharapkan ada pengadaan alat perekaman *mobile* di tiap kecamatan. Tujuannya, tiap kecamatan juga bisa melakukan jemput bola perekaman langsung ke desa, bahkan hingga tingkat RT. Warga juga semakin mudah karena tak perlu jauh-jauh ke mal pelayanan publik (MPP).

"Tapi, nanti bergantung kemampuan anggaran," katanya. Nantinya, usulan pengadaan alat tersebut disampaikan lang-

sung oleh tiap kecamatan. Proyeksinya, akhir tahun ini pengadaan bisa dimulai lewat perubahan anggaran keuangan (PAK).

Redy mengungkapkan, saat ini alat perekaman *mobile* tersebut hanya ada satu, yakni di Kecamatan Tulangan. Perlu ditambah di kecamatan lain. "Itu namanya *mobile enrollment*, alat rekam keliling dalam satu tas besar berisi alat untuk rekam iris mata, *finger* sidik jari, *sign pad* untuk tanda tangan, dan laptop," jelasnya.

Petugas tinggal membawa alat tersebut untuk jemput bola. Misalnya, ke warga yang berkebutuhan khusus atau lainnya. "Satu set alat tersebut butuh anggaran sekitar Rp 100-120 juta," katanya. Jika nantinya disepakati dan anggarannya cukup, operator di tingkat kecamatan juga bakal dilatih untuk penggunaannya. (uzi/c7/any)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



DIMULAI : Petugas Pantarlih melakukan coklit ke warga Kecamatan Taman.

Proses Coklit Pilkada, Warga Diminta Siapkan KTP atau KK

TAMAN-KPU Sidoarjo mulai melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih untuk Pilkada 2024. Proses tersebut akan berlangsung selama sebulan.

Dimulai pada Senin (24/6) kemarin hingga 24 Juli nanti. KPU Sidoarjo menurunkan 5.414 petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).

“Sudah ada petugas pantarlih yang turun ke lapangan setelah proses pengambilan sumpah, karena ini untuk mengejar target satu juta Coklit pemilih seperti yang ditarget KPU Jatim,” ucap anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

● Ke Halaman 10



Polresta Sidoarjo Peduli Difabel

Sidoarjo, Memorandum

Rangkaian kegiatan sosial kemasyarakatan memperingati Hari Bhayangkara ke-78 tahun, salah satunya dilakukan Polresta Sidoarjo melalui Si Dokkes dengan pemeriksaan kesehatan dan bakti sosial bagi warga difabel.

Kegiatan yang berlangsung Mapolsek Sidoarjo Kota, Selasa (25/6), sukses mengumpulkan sekitar 100 orang difabel. Polresta Sidoarjo menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial.

Kapolresta Sidoarjo Kombespol Christian Tob-

ing didampingi Kasidokkes Iptu Rukwandi, melakukan pengecekan bakti kesehatan bagi warga difabel. Di akhir acara bakti kesehatan, warga yang datang diberi paket bantuan berisi sembako.

"Bakti kesehatan dan bakti sosial bagi difabel ini,

kami selenggarakan dalam rangkaian Hari Bhayangkara ke-78. Harapannya penyandang disabilitas dapat terkontrol kondisi kesehatannya melalui kegiatan bakti kesehatan Polri. Sehingga dapat memacu semangat mereka untuk tetap beraktivitas," ujar Kombespol Christian Tobing.

Dari bakti kesehatan dan bakti sosial bagi difabel memperingati Hari Bhayangkara ke-78, diharapkan rutin dilakukan. "Den-

gan upaya seperti ini, selain semakin mendekatkan Polri bersama masyarakat, juga guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat," katanya.

Salah satu peserta bakti kesehatan asal Luwung, Sukmawati (54), mengaku sangat terharu dengan program ini. "Begitu besar perhatian bapak-bapak Polri bagi kami. Ini menambah semangat kami untuk terus berkarya di tengah keterbatasan," ungkapnya. (im/kri/jok/epe)

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Demi Penuhi Hak Masyarakat, Pemkab Sidoarjo Harus Siapkan Piranti Ini di Setiap Kecamatan

Admin

Tuesday, June 25, 2024, June 25, 2024 WIB



Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori.

DNN, SIDOARJO – Komisi A DPRD Sidoarjo mendesak Pemkab Sidoarjo melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera mengajukan anggaran guna pengadaan piranti perekaman data kependudukan mobile serta mesin pencetak KTP elektronik untuk semua kantor kecamatan di kota delta.

“Diajukan sekarang saja sehingga bisa kami proses di PAK (Perubahan Anggaran Keuangan-red) nanti,” pinta Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori yang dihubungi melalui telepon selulernya beberapa waktu lalu.



Apalagi menurutnya nilai rupiah alat-alat tersebut juga tak terlalu besar. Legislator asal PKB itu memperkirakan harga piranti tersebut berkisar Rp 100 juta/unit. Sehingga total hanya dibutuhkan anggaran sekitar Rp 1,8 Miliar untuk 18 kecamatan. "Saya kira pasti adalah dananya kalau nilainya hanya segitu," lanjutnya.



Kegiatan perekaman data kependudukan dengan menggunakan piranti E-KTP Mobile oleh staf kecamatan Tulangan beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut Dhamroni mengatakan nilai rupiah sebesar itu tidak akan ada artinya jika dibandingkan dengan dampak positif yang diberikan Pemkab Sidoarjo pada warganya. Karena masyarakat akan terlayani dengan baik terkait dokumen kependudukan.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

"Semua warga Sidoarjo pasti akan terlayani dengan baik jika kita punya alat tersebut. Semua, termasuk para lansia, difabel (cacat-red) maupun ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa-red) yang jelas-jelas tak mungkin datang ke kantor kecamatan untuk melakukan perekaman data kependudukannya. Baik itu KTP maupun Kartu keluarga," tandas politisi asal Tulangan itu.

Sampai saat itu hal itu masih menjadi titik lemah pelayanan kependudukan di Sidoarjo karena ketiadaan piranti tersebut. "Saya lihat sendiri masih banyak lansia, difabel dan ODGJ di desa-desa yang belum memiliki KTP," imbuh Dhamroni.

Padahal dokumen kependudukan tersebut sangat mereka butuhkan agar bisa mengakses bantuan dari pemerintah terkait bantuan sosial (bansos) dalam berbagai bentuk dan sumber, serta bantuan layanan kesehatan yang berkelanjutan.

"Khan tidak mungkin mereka bisa dapat bansos atau BPJS gratis kalau tak punya KTP. Karena itu pemerintah harus hadir dan berperan aktif dalam hal ini. Ingat ya, dokumen kependudukan itu merupakan hak dasar masyarakat yang menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya," katanya lagi.

Informasi yang diterima Dhamroni, hingga saat ini dari 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, hanya Tulangan saja yang memiliki alat perekaman e-KTP mobile yang dipakai untuk mempercepat pelayanan bagi masyarakat.(pram)



Honorer Dishub Minta Komisi A DPRD Sidoarjo Perjuangkan Nasib Mereka seperti Satpol PP

Editor: Fathur Roziq

25 Jun 2024 18:54



Pegawai honorer Dishub Sidoarjo yang bertugas untuk pengendalian dan operasional lalu lintas di kawasan Alun-Alun Sidoarjo. (Foto: Dishub Sidoarjo)

Politik & Pemerintahan



Aa

AA

KETIK, SIDOARJO – Persoalan tenaga honorer di tubuh Pemkab Sidoarjo terus bermunculan. Sebelumnya ratusan honorer penjaga sekolah dan anggota Satpol PP Sidoarjo mengeluhkan nasib. Berikutnya, ratusan tenaga honorer di Dishub Sidoarjo juga mengadukan status mereka ke Komisi A DPRD Sidoarjo. Masa depan belum jelas.

Para tenaga honorer itu datang ke kantor DPRD Sidoarjo Rabu (25/6/2024). Sekitar pukul 08.00 pagi, mereka menelepon Ketua Komisi DPRD Sidoarjo H Dhamroni Chudlori. Minta bisa segera bertemu. Padahal, saat itu Dhamroni sedang menghadiri sebuah acara. Dia baru bisa menemui sekitar pukul 10.00.

Namun, waktu itu, para honorer Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo itu belum mengajukan surat resmi. Baik untuk audiensi maupun *hearing*. Dhamroni pun menemui mereka di ruang Fraksi PKB, bukan ruang komisi atau ruang rapat seperti biasanya.

"Mereka tetap saya minta mengirim surat resmi. Buat audiensi dengan Komisi A DPRD Sidoarjo," ungkap legislator asal PKB Sidoarjo tersebut.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Di ruang Fraksi PKB, Dhamroni mendengarkan keluhan para tenaga honorer Dishub Sidoarjo tersebut. Mereka pun sambat. Sudah belasan tahun mengabdikan sebagai tenaga honorer, nasib belum jelas. Ada yang 5 tahun, 13 tahun, bahkan 15 tahun.

"Kami minta bantuan Pak Ketua (Komisi A DPRD Sidoarjo) agar nasib kami juga diperjuangkan," ungkap Muhajir, pegawai honorer bidang pengendalian dan operasional (dalops) Dishub Sidoarjo.

Muhajir bercerita. Dirinya sudah menjadi tenaga honorer sejak masa tugas Kepala Dishub M. Husni Thamrin (almarhum). Tahun sekitar 2010-an. Selama itu mereka bertugas sebagai pegawai Dishub Sidoarjo. Yang paling sering tugas di jalanan sebagai petugas lalu lintas. Muhajir mengaku belum pernah ikut seleksi apa pun. Baik seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) maupun seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

"Kami berharap ada prioritas saat rekrutemen PPPK," ungkap Muhajir.

Hal yang sama disampaikan Amiruddin. Nasibnya setali tiga uang dengan Muhajir. Sudah mengabdikan 13 tahun di Dishub Sidoarjo. Tapi, status dan nasib juga belum jelas hingga sekarang. Rata-rata sejak muda sampai mereka berkeluarga. Mereka berharap ada perbaikan nasib di usia yang sudah menua ini.

Informasinya, jumlah tenaga honorer bidang pengendalian dan operasional (dalops) di Dishub Sidoarjo mencapai 68 orang. Sebagian besar laki-laki. Sekitar 10 orang perempuan. Selain mereka, ada lagi 92 tenaga penjaga pintu lintasan kereta api. Sama nasibnya. Status mereka belum jelas hingga sekarang.

"Itu belum termasuk tenaga kebersihan dan lain-lain," tambah Kepala Dishub Sidoarjo Benny Airlangga Yogaswara.



Benny menyatakan bisa memaklumi keinginan ratusan bawahannya tersebut. Sebab, faktanya memang mereka masih menjadi tenaga honorer. Semua berharap bisa masuk seleksi PPPK. Benny mendukung langkah anak buahnya itu. Termasuk ikut menyusul datang untuk bertemu dengan Komisi A DPRD Sidoarjo.

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori menyatakan akan berusaha membantu ratusan tenaga honorer di Dishub Sidoarjo itu. Nasib mereka seperti para penjaga sekolah di 18 kecamatan se-Sidoarjo. Juga, ratusan anggota Satpol PP Sidoarjo dan petugas trantib di kecamatan-kecamatan. Formasi PPPK sangat minim.

"Mereka bilang. Nasib anggota Satpol PP saja diperjuangkan. Tenaga honorer dishub juga ingin diperjuangkan," ujar Dhamroni.

Dalam pertemuan di ruang Fraksi PKB, Komisi A DPRD Sidoarjo belum mengundang perwakilan Pemkab Sidoarjo. Baik Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo, Bagian Organisasi Pemkab Sidoarjo, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sidoarjo. Mereka bakal dihadirkan dalam pertemuan berikutnya.

"Cuma, saya minta mengirim surat resmi dulu ke DPRD agar bisa *hearing*. Sedang kami pikirkan. Apakah mereka diundang bareng. Penjaga sekolah, Satpol PP, dan honorer dishub. Atau, kami undang *hearing* sendiri-sendiri," ungkap Dhamroni.

Pada dasarnya, lanjut Dhamroni, Komisi A DPRD Sidoarjo berharap ada kebijakan khusus di Pemkab Sidoarjo. Semacam *local wisdom*. Ada nomenklatur khusus untuk mereka agar dapat penghargaan yang wajar dari Pemkab Sidoarjo. Tujuannya adalah mengapresiasi pengabdian para tenaga honorer itu. *Reward* yang layak sesuai pengabdian.

Komisi A meminta BKD dan Bagian Organisasi Pemkab Sidoarjo untuk mendata dan mengumpulkan informasi tentang pengabdian mereka. Berikutnya, dibuatkan kluster-kluster sesuai pengabdian di instansi masing-masing.

"Karena masiha ada juga tenaga honorer lain di OPD (organisasi perangkat daerah) lain," ungkapnya. (*)

Dewan Minta Pemkab Ajukan Anggaran Piranti e-KTP Keliling

SIDOARJO (GN)—Menyikapi masih banyaknya warga di Sidoarjo yang tidak memiliki dokumen data kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK), Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo mendesak Pemkab Sidoarjo untuk segera mengajukan anggaran pengadaan piranti perekaman data kependudukan mobile/keliling serta mesin pencetak KTP elektronik (e-KTP) di 18 kantor kecamatan.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sidoarjo diharapkan untuk segera mengajukan rancangan anggaran agar bisa dibahas dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sidoarjo tahun 2024 ini.

"Diajukan sekarang saja, sehingga bisa kami proses di PAK nanti," kata H. Damroni Chudlori, Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo sebagai dikutip, Selasa (25/06/2024).

Diperkirakan harga piranti perekaman data kependudukan setiap unitnya tidak terlalu besar, sekitar Rp 100 juta per unit. Untuk pengadaan piranti perekaman data kependudukan keliling tersebut, hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp 1,8 miliar untuk 18 kantor kecamatan se Kabupaten Sidoarjo. "Saya kira pasti adalah dananya, kalau nilainya hanya



Proses perekaman e-ktp yang dilakukan di Dispendukcapil Sidoarjo. inset : H. Damroni Chudlori

GN/istimewa

segitu," katanya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengungkapkan bahwa pengadaan piranti perekaman data kependudukan keliling harus segera dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Para pegawai kantor kecamatan bisa 'jemput bola' dengan turun langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat berkebutuhan khusus. Seperti Orang Dengan Gangguan

Jiwa (ODGJ), cacat fisik atau difabel serta panti lanjut usia (lansia).

"Semua warga Sidoarjo pasti akan terlayani dengan baik, jika kita punya alat tersebut. Semua, termasuk para lansia, difabel maupun ODGJ yang jelas-jelas tidak mungkin datang ke kantor kecamatan untuk melakukan perekaman data kependudukannya. Baik itu KTP maupun KK," ungkapnya.

Legislator asal Kecamatan Tulangan itu menjelaskan bahwa sampai saat ini, tidak adanya per-

ekaman data kependudukan keliling masih menjadi titik lemah pelayanan kependudukan di Kabupaten Sidoarjo.

"Saya lihat sendiri masih banyak lansia, difabel dan ODGJ di desa-desa yang belum memiliki KTP," jelasnya.

Padahal dokumen kependudukan tersebut sangat mereka butuhkan agar bisa mengakses bantuan dari pemerintah terkait bantuan sosial (bansos) dalam berbagai bentuk dan sumber, serta bantuan layanan kesehatan yang berkelanjutan. **sda**